



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 60/PHP.BUP-XIX/2021
PERKARA NOMOR 70/PHP.BUP-XIX/2021
PERKARA NOMOR 85/PHP.BUP-XIX/2021**

**PERIHAL
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI KABUPATEN
KUANTAN SINGINGI TAHUN 2020
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI KABUPATEN
ROKAN HULU TAHUN 2020
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI KABUPATEN
ROKAN HILIR TAHUN 2020**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

JAKARTA

JUMAT, 29 JANUARI 2021



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

**PERKARA NOMOR 60/PHP.BUP-XIX/2021
PERKARA NOMOR 70/PHP.BUP-XIX/2021
PERKARA NOMOR 85/PHP.BUP-XIX/2021**

PERIHAL

Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020
Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020
Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2020

PEMOHON

1. Halim dan Komperensi (Perkara Nomor 60/PHP.BUP-XIX/2021)
2. Hafith Syukri dan Erizal (Perkara Nomor 70/PHP.BUP-XIX/2021)
3. Suyatno dan Jamiludin (Perkara Nomor 85/PHP.BUP-XIX/2021)

TERMOHON

KPU Kabupaten Kuantan Singingi
KPU Kabupaten Rokan Hulu
KPU Kabupaten Rokan Hilir

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Jumat, 29 Januari 2021, Pukul 13.32 – 15.09 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Aswanto | (Ketua) |
| 2) Suhartoyo | (Anggota) |
| 3) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |

**I Made Gede W. T. K
Dian Chusnul**

**Panitera Pengganti
Panitera Pengganti**

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon Perkara Nomor 60/PHP.BUP-XIX/2021:

1. H. Halim
2. Komperensi

B. Kuasa Pemohon Perkara Nomor 60/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Asep Ruhiat
2. Wahyu Yandika
3. Fauziah Aznur
4. Malden Richardo Siaahaan
5. Ahmad Razali

C. Pemohon Perkara Nomor 70/PHP.BUP-XIX/2021:

Hafith Syukri

D. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 70/PHPU.BUP-XIX/2021:

Melisa Anggraini

E. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 85/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Aswandi
2. Asep Ruhiat
3. Eko Indrawan
4. Amran
5. Ahmad Razali
6. Malden Richardo Siaahaan
7. Fauziah Aznur

F. Termohon Perkara Nomor 60/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Wigati Iswandhiari
2. Wawan Ardi
3. Irwan Yuhendi

G. Kuasa Hukum Termohon Perkara Nomor 60/PHP.BUP-XIX/2021:

Missiniaki Tommi

H. Termohon Perkara Nomor 70/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Elfendri
2. Azhar Hasibuan

I. Kuasa Hukum Termohon Perkara Nomor 70/PHP.BUP-XIX/2021:

Sudi Prayitno

J. Termohon Perkara Nomor 85/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Supriyanto
2. Hasbullah Rambe

K. Kuasa Hukum Termohon Perkara Nomor 85/PHP.BUP-XIX/2021:

Suryadi

L. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 60/PHP.BUP-XIX/2021:

Dody Fernando

M. Bawaslu Perkara Nomor 60/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Mardius Adi Saputra
2. Nur Afni

N. Bawaslu Perkara Nomor 70/PHP.BUP-XIX/2021:

Fanny Ariandi

O. Bawaslu Perkara Nomor 85/PHP.BUP-XIX/2021:

Fakhlurrozi

P. Bawaslu Provinsi Riau:

1. Rusidi Rusdan
2. Hasan

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.32 WIB

1. KETUA: ASWANTO

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua.

Sidang Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Tahun 2020 untuk Kabupaten Rokan Hulu Nomor Perkara Nomor 70/PHP.BUP-XIX/2021, Kabupaten Rokan Hilir dan Kabupaten ... Nomor 85/PHP.BUP-XIX/2021, dan Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 60/PHP.BUP-XIX/2021 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Sebelum kita melanjutkan persidangan ini, ada beberapa hal yang perlu kami informasikan. Pertama soal protokol kesehatan agar semua pihak selama kita di ruangan ini tetap menggunakan masker termasuk ketika membaca atau berbicara.

Yang kedua, Para Pemohon kalau ada bukti tambahan yang mau dimasukkan, bisa dimasukkan sekarang agar kami bisa memverifikasi untuk selanjutnya bisa kita sahkan pada akhir sidang nanti. Kalau ada tinggal angkat tangan, nanti Petugas kami yang akan datang ambil.

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 85/PHP.BUP-XIX/2021: ASWANDI

Ada, Yang Mulia.

3. KETUA: ASWANTO

Silakan, Mas. Ada yang ... Selamat siang para pihak yang mengikuti sidang ini secara online, KPU RI. Selamat siang, Bapak. Dengan Para Pihak Termohon yang mengikuti secara online, selamat siang juga. Kemudian, Kuasa Hukum dari semua pihak yang hadir secara online, selamat siang. Termasuk Para Prinsipal dari Pemohon yang hadir, selamat siang.

Baik. Untuk memandu sidang ini, mohon yang Mulia Bapak Dr. Daniel, silakan.

4. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

Assalamualaikum wr. wb. Shalom, salam sejahtera, om swastiastu namo buddhaya, salam kebajikan.

Yang pertama, saya beri kesempatan kepada Pemohon Nomor 70/PHP.BUP-XIX/2021 untuk memperkenalkan diri. Silakan.

5. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 70/PHP.BUP-XIX/2021: MELISA ANGGRAINI

Terima kasih, Yang Mulia.

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua.

Perkenalkan, kami dari Pemohon Perkara Nomor 70/PHP.BUP-XIX/2021 Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020. Hari ini dalam persidangan dihadirkan ada Prinsipal bersama kami di belakang saya, yaitu bapak Ir. H. Hafith Syukri, M.M. dan saya sendiri sebagai Kuasa Hukum, Melisa Anggraini, S.H., M.H. Terima kasih, Yang Mulia.

6. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Baik, terima kasih.

Kami ingin konfirmasi pada Prinsipal, ada kuasa yang pertama yang mendaftarkan ini di dalam dokumen yang kami miliki, penerima kuasa itu Saudara Irwan, S.H., M.H dan Adi Rahman, S.H. Apakah betul ini Kuasanya dari Prinsipal?

7. PEMOHON PERKARA NOMOR 70/PHP.BUP-XIX/2021: HAFITH SYUKRI

Yang pertama, ya, Yang Mulia.

8. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Yang pertama maksudnya ada yang kedua?

9. PEMOHON PERKARA NOMOR 70/PHP.BUP-XIX/2021: HAFITH SYUKRI

Ya, kita alihkan ke yang kedua, itu, Pak Noto, dan kawan-kawannya.

10. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Jadi yang pertama dicabut, ya?

11. PEMOHON PERKARA NOMOR 70/PHP.BUP-XIX/2021: HAFITH SYUKRI

Ya, sudah.

12. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Oke. Sebab dalam permohonan ini yang menandatangani ini yang pertama, ya. Ini karena Prinsipal ada jadi sudah bisa langsung kami konfirmasi.

Kemudian dilanjutkan dengan Permohonan Nomor 85/PHP.BUP-XIX/2021, ya. Silakan memperkenalkan diri.

13. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 85/PHP.BUP-XIX/2021: ASWANDI

Baik, Yang Mulia. Perkenalkan kami Kuasa Hukum dari Pemohon Perkara Nomor 85/PHP.BUP-XIX/2021. Saya sebagai Kuasa Pemohon, nama Aswandi bersama Kantor Hukum Asep Ruhiat dan Partners.

14. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Aswandi nomor berapa di dalam Surat Kuasa?

15. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 85/PHP.BUP-XIX/2021: ASWANDI

Nomor 12, Yang Mulia.

16. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

12, ya. Sama siapa yang hadir?

17. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 85/PHP.BUP-XIX/2021: ASWANDI

Asep Ruhiat, S.Ag., M.H, Yang Mulia.

18. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Asep ... yang nomor 1, ya?

19. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 85/PHP.BUP-XIX/2021: ASWANDI

Ya.

20. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Oke.

21. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 85/PHP.BUP-XIX/2021: ASWANDI

Selanjutnya, (...)

22. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Apakah ada hadir secara online?

23. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 85/PHP.BUP-XIX/2021: ASWANDI

Ada, Yang Mulia.

24. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Siapa yang ada secara online?

25. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 85/PHP.BUP-XIX/2021: ASWANDI

Eko Indrawan, S.H., Amran, S.H., M.H., Ahmad Razali, S.H., Malden Richardo Siahaan, S.H., M.H., Fauziah Aznur, S.H., Yang Mulia.

26. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Oke, itu secara online, ya?

27. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 85/PHP.BUP-XIX/2021: ASWANDI

Ya, Yang Mulia.

28. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Baik. Apakah prinsipalnya hadir secara online?

29. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 85/PHP.BUP-XIX/2021: ASWANDI

Tidak, Yang Mulia.

30. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Tidak, ya.

Baik, kemudian dilanjutkan dengan Permohonan Nomor 60/PHP.BUP-XIX/2021, silakan memperkenalkan diri.

31. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 60/PHP.BUP-XIX/2021: ASEP RUHIAT

Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb.

Kami sebagai Kuasa Hukum Nomor 60/PHP.BUP-XIX/2021 yang ada di ruang sidang ini adalah saya Asep Ruhiat. Yang kedua, Wahyu Yandika, dan yang daring telah hadir juga ada Fauziah Aznur, Malden Richardo Siaahaan, Ahmad Razali, dan Prinsipal juga hadir cuma tidak termuat di situ. Terima kasih, Yang Mulia.

32. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Baik, yang pertama, Pak Asep, ya?

33. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 60/PHP.BUP-XIX/2021: ASEP RUHIAT

Ya.

34. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Kemudian, Pak Wahyu yang hadir di sini?

35. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 60/PHP.BUP-XIX/2021: ASEP RUHIAT

Ya.

36. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Baik. Kemudian kita lanjutkan dengan Termohon. Yang pertama dari Rokan Hulu, ya, Nomor 70/PHP.BUP-XIX/2021, silakan.

37. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 70/PHP.BUP-XIX/2021: SUDI PRAYITNO

Assalamualaikum wr. wb. Terima kasih, Yang Mulia. Perkenalkan saya Sudi Prayitno, S.H., L.L.M. Kuasa dari KPU Rokan Hulu yang pada kesempatan kali ini didampingi oleh Bapak Azhar Hasibuan selaku divisi hukum dan juga dihadiri secara online oleh Ketua KPU Rokan Hulu, Bapak Elfendri. Terima kasih. Assalamualaikum wr.wb.

38. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Walaikumsalam. Terima kasih. Ada Surat Kuasanya?

39. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 70/PHP.BUP-XIX/2021: SUDI PRAYITNO

Ada, Yang Mulia.

40. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Bisa diserahkan ke Petugas.

Kemudian Termohon dari Permohonan 70/PHP.BUP-XIX/2021, silakan untuk memperkenalkan diri. Dari 70/PHP.BUP-XIX/2021 Termohon, tidak ada? Sori. 85/PHP.BUP-XIX/2021, silakan.

41. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 85/PHP.BUP-XIX/2021: SURYADI

Baik, terima kasih. Assalamualaikum wr.wb. Perkenalkan kami mewakili dari Kuasa Hukum KPU Kabupaten Rokan Hilir. Saya Suryadi yang hadir di kesempatan ini didampingi oleh divisi hukum KPU Kabupaten Rokan Hilir, Bapak Hasbullah Rambe dan dihadiri pula secara online oleh Ketua KPU Rokan Hilir yang bernama Bapak Supriyanto. Mungkin itu, Yang Mulia, terima kasih.

42. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Ada Surat Kuasanya?

43. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 85/PHP.BUP-XIX/2021: SURYADI

Ada, Yang Mulia.

44. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Tolong diserahkan ke Petugas.

45. KETUA: ASWANTO

Tolong maskernya, Mas, hidungnya juga ditutup.

46. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Kemudian 60/PHP.BUP-XIX/2021, ya. Termohon 60/PHP.BUP-XIX/2021, silakan.

47. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 60/PHP.BUP-XIX/2021: MISSINIAKI TOMMI

Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr.wb.

Perkenalkan, kami Termohon KPU Kabupaten Kuantan Singingi Perkara Nomor 60/PHP.BUP-XIX/2021 yang hadir secara langsung, saya Missiniaki Tommi mewakili Kuasa Termohon. Yang kedua, Bapak Wawan Ardi mewakili Divisi Hukum KPU Kabupaten Kuantan Singingi. Dan hadir secara online, Bapak Irwan Yuhendri Selaku Ketua KPU Kuantan Singingi dan Ibu Wigati Iswandhiari mewakili Komisioner KPU Kabupaten Kuantan Singingi. Sekian, Yang Mulia.

48. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Baik, terima kasih. Ada Kuasanya?

49. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 60/PHP.BUP-XIX/2021: MISSINIAKI TOMMI

Ada, Yang Mulia.

50. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Silakan diserahkan ke Petugas. Kemudian dilanjutkan dengan Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu, silakan memperkenalkan diri.

51. BAWASLU PERKARA NOMOR 70/PHP.BUP-XIX/2021: FANY ARIANDI

Assalamualaikum wr. wb. Terima kasih, Yang Mulia. Izin memperkenalkan diri saya Fanny Ariandi, Koordinator Hukum Humas Hubal, Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu yang hadir pada hari ini

didampingi oleh Bapak Rusdi Rusdan, Ketua Bawaslu Provinsi Riau. Terima kasih, Yang Mulia.

52. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Baik, terima kasih. Ada surat tugasnya?

53. BAWASLU PERKARA NOMOR 70/PHP.BUP-XIX/2021: FANY ARIANDI

Ada, Yang Mulia.

54. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Tolong diserahkan ke Petugas. Selanjutnya Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir.

55. BAWASLU PERKARA NOMOR 85/PHP.BUP-XIX/2021: FAKHLURROZI

Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr.wb.

Izin, Yang Mulia. Perkenalkan nama saya Fakhlorrozi, S.Hi. dari Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir Divisi Hukum. Secara langsung kami hadir didampingi oleh Pimpinan Bawaslu Provinsi Riau, yaitu Pak Hasan. Terima kasih, Yang Mulia.

56. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Baik, terima kasih. Sekalian nanti siapkan surat tugasnya diserahkan ke Petugas. Yang terakhir dari Kabupaten Kuantan Singingi, ya. Silakan.

57. BAWASLU PERKARA NOMOR 60/PHP.BUP-XIX/2021: MARDIUS ADI SAPUTRA

Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr.wb.

Izin, Yang Mulia. Perkenalkan saya Mardius Adi Saputra, Ketua Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi, hadir dalam Perkara Nomor 60/PHP.BUP-XIX/2021 bersama Nur Afni, S.Sos., Anggota Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi. Terima kasih, Yang Mulia.

58. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Baik, sekalian disiapkan Surat Tugasnya untuk Petugas (...)

59. BAWASLU PERKARA NOMOR 60/PHP.BUP-XIX/2021: MARDIUS ADI SAPUTRA

Siap, siap.

60. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Setelah perkenalan, Pemeriksaan Pendahuluan pada hari ini akan memeriksa kelengkapan, kejelasan materi permohonan, pengesahan, kemudian pengucapan ketetapan Pihak Terkait. Untuk itu pada kesempatan ini, kami beri kesempatan kepada Pemohon Pertama, Pemohon Nomor 70/PHP.BUP-XIX/2021 untuk menyampaikan Pokok-Pokok Permohonan. Permohonannya sudah kami baca dan sudah kami gelar perkara. Waktunya hanya 15 menit. Karena itu, hanya disampaikan pokok-pokoknya saja. Silakan.

61. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 70/PHP.BUP-XIX/2021: MELISA ANGGRAINI

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

Bismillahirrahmaanirrahim. Permohonan Perkara Nomor 70/PHP.BUP-XIX/2021, Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020. Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi, kami bertindak untuk dan atas nama:

1. Ir. H. Hafith Syukuri, M.M. Alamat dianggap dibacakan.
2. H. Erizal, S.T. Alamat dianggap dibacakan.

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 dengan Nomor Urut 3, sebagaimana Keputusan Kabupaten Rokan Hulu Nomor 274/PL.02.2-Kpt/1406/KPU-Kab/IX/2020 juncto Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hulu Nomor 277/PL.02.2-Kpt/1406/KPU-Kab/IX/2020, yang telah memberikan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 18 Desember 2020 kepada Irwan, S.H., M.H., dan Adi Rahman, S.H., Para Advokat yang beralamat dianggap dibacakan.

Kemudian, memberikan surat pencabutan kuasanya yang telah diterima dan telah diketahui oleh penerima kuasa pada tanggal 4 Januari 2021.

Bahwa kemudian Pasangan Calon Nomor Urut 3 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 memberikan Kuasa Khusus berdasarkan Surat Kuasa, tertanggal 5 Januari 2020, kepada Unoto Dwi Yulianto, S.H., M.H., Melisa Anggraini, S.H., M.H., Ridwan Nurohim, S.H., Ibrar, S.H., Teja Sukmana, S.H., dan kawan-kawan. Kesemuanya Advokat Hukum pada Kantor Hamid Hudaya, beralamat dianggap dibacakan. Baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, selanjutnya disebut Pemohon.

Terhadap Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu, berkedudukan dianggap dibacakan. Selanjutnya disebut Termohon. Dalam hal ini, Yang Mulia, mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hulu Nomor 620/PL.02.6-Kpt/1406/KPU-Kab/XII/2020.

Yang diumumkan pada hari Selasa, tanggal 16 Desember 2020.

Yang pertama, Kewenangan Mahkamah Konstitusi, kami mohon dianggap dibacakan.

Yang kedua, Kedudukan Hukum Pemohon.

1. Bahwa berdasarkan Keputusan Termohon Nomor 274/PL.02.2-Kpt/1406/KPU-Kab/IX/2020, tertanggal 23 September 2020 yang menetapkan Pemohon merupakan pasangan calon (...)

62. KETUA: ASWANTO

Ini kan memang ada penggantian (suara tidak terdengar jelas), tapi yang harus Anda bacakan yang sudah diregistrasi, jangan yang Anda bikin sendiri baru. Ini saya pegang yang perbaikan. Tidak sesuai dengan yang Ibu baca tadi.

Anda walaupun Kuasa baru, tidak berarti bahwa harus memasukkan perbaikan baru karena sudah lewat waktu kalau Anda masukkan.

Betul, lewat, lewat, Yang Mulia. Nah, perbaikannya pun juga lewat waktu menurut catatan kami. Anda mau membacakan yang lewat waktu atau tetap pada permohonan awal?

63. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 70/PHP.BUP-XIX/2021: MELISA ANGGRAINI

Tetap pada permohonan awal, Yang Mulia.

64. KETUA: ASWANTO

Nah, kalau permohonan awal, yang ... apa namanya ... jangan yang ini, jangan yang perbaikan, bahkan perbaikan pun ini perbaikan yang Anda buat sendiri, gitu. Walaupun Anda Kuasa baru, tapi tidak berarti itu tadi. Anda harus melanjutkan apa yang sudah dimasukkan oleh Kuasa.

65. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 70/PHP.BUP-XIX/2021: MELISA ANGGRAINI

Baik, Yang Mulia. Kami melanjutkan memang dari permohonan yang sudah diregistrasi, Yang Mulia.

66. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, Prof.

67. KETUA: ASWANTO

Perbaikan tidak ada lewat waktu, ya?

68. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 70/PHP.BUP-XIX/2021: MELISA ANGGRAINI

Tidak, Yang Mulia.

69. KETUA: ASWANTO

Baik, kalau begitu, baca yang perbaikan, perbaikan yang dimasukkan berarti oleh kuasa awal.

70. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya.

71. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 70/PHP.BUP-XIX/2021: MELISA ANGGRAINI

Oh, baik, Yang Mulia.

72. KETUA: ASWANTO

Jangan yang Anda bikin sendiri.

73. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 70/PHP.BUP-XIX/2021: MELISA ANGGRAINI

Oh, tidak, Yang Mulia. Ini yang dari kuasa awal yang kita bacakan, Yang Mulia.

74. KETUA: ASWANTO

Ya, tapi saya ikuti, tapi lain yang Anda bacakan.

75. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 70/PHP.BUP-XIX/2021: MELISA ANGGRAINI

Yang saya bacakan memang sudah yang diresume, Yang Mulia. Biar mempersingkat waktu.

76. KETUA: ASWANTO

Oke, kalau gitu. Tadi Anda bacakan kedudukan hukum (legal standing).

77. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya.

78. KETUA: ASWANTO

Satu. Ini di sini a dan seterusnya.

79. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Resumennya ada berapa halaman, Ibu?

80. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 70/PHP.BUP-XIX/2021: MELISA ANGGRAINI

Ada 10 halaman, Yang Mulia.

81. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

10, ya. Ya, tadi memang soal pergantian kuasa kan juga enggak ada di permohonan. Itu mungkin improve dari ... tapi pada dasarnya adalah yang perbaikan.

82. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 70/PHP.BUP-XIX/2021: MELISA ANGGRAINI

Yang dimasukkan.

83. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Di-resume boleh, tapi pokok-pokoknya adalah diserap dari permohonan perbaikan.

84. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 70/PHP.BUP-XIX/2021: MELISA ANGGRAINI

Ya. Gitu, Pak Ketua.

85. KETUA: ASWANTO

Ya, jadi tolong, ya. Yang tetap berpatokan pada yang sudah masuk sekalipun ada resume, ya?

86. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 70/PHP.BUP-XIX/2021: MELISA ANGGRAINI

Baik, Yang Mulia.

87. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Baik, silakan dilanjutkan karena tadi memang Pemohon membacakan terkait dengan pencabutan dan pemberian kuasa yang baru. Ini kan sudah tanggal 5 Januari.

88. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 70/PHP.BUP-XIX/2021: MELISA ANGGRAINI

Ya, Yang Mulia.

89. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Yang mengacu pada kuasa baru itu berarti sudah melewati waktu.

90. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 70/PHP.BUP-XIX/2021: MELISA ANGGRAINI

Sudah. Makanya kita kembali.

91. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Pak Ketua mengingatkan supaya membacakan yang asli. Yang lama, ya, sebelum kuasa. Silakan dilanjutkan.

92. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 70/PHP.BUP-XIX/2021: MELISA ANGGRAINI

Kedua. Kedudukan Hukum Pemohon. Bahwa berdasarkan keputusan Termohon Nomor 277/PL.02.2-Kpt/1406/KPU-Kab/IX/2020, tertanggal 24 September 2020 menetapkan Pemohon adalah Pasangan Calon Nomor Urut 3 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020.

Bahwa jumlah penduduk Kabupaten Rokan Hulu pada tahun 2020 sejumlah 718.321 jiwa. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang menyatakan kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500 jiwa sampai dengan 1 juta jiwa mengajukan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% dari total suara sah hasil perhitungan suara tahap akhir KPU kabupaten/kota. Bahwa berdasarkan keputusan Termohon Nomor 620 dan lainnya kami anggap dibacakan.

93. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Ya, Baik.

94. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 70/PHP.BUP-XIX/2021: MELISA ANGGRAINI

Dengan demikian batas pengajuan permohonan 1% dari 231.795 adalah sebanyak 2.318 suara.

Selanjutnya bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Nomor Urut 2 menurut Termohon adalah sebanyak 2.148 suara. Dengan demikian Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan di Mahkamah Konstitusi. Sebagaimana ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.

3. Tenggang waktu pengajuan dan ... tenggang waktu pengajuan permohonan.

Bahwa Termohon mengeluarkan keputusan Nomor 620/PL.02.6-Kpt/1406/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu, tertanggal 16 Desember 2020 yang diumumkan pukul 17.23 WIB.

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pembatalan atas keputusan Termohon di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari Jumat, tanggal 18 Desember 2020 pukul 23.35 WIB.

Bahwa berdasarkan hal tersebut permohonan yang diajukan Pemohon masih dalam limitasi waktu, sebagaimana diatur di dalam

ketentuan Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 juncto Pasal 7 ayat (2) PMK Nomor 6 Tahun 2020.

4. Pokok permohonan. Bahwa berdasarkan rekapitulasi perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon, sebagaimana tercantum di dalam nomor sekian-sekian dianggap dibacakan. Hingga total suara sah sebesar 231.795.

Bahwa menurut Pemohon, perolehan suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu seharusnya adalah sebagai berikut.

1. H. Hamulian, S.P., dan M. Sahril Topan, S.T.= 49.155 suara
 2. H. Sukiman dan H. Indra Gunawan= 89.736 suara
 3. Ir. H. Hafith Syukri dan H. Erizal, S.T.= 90.246 suara
- Total suara sah 229.137 suara.

Bahwa adanya selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Termohon dikarenakan Termohon tetap memasukkan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebanyak 2.658 suara di Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara. Meskipun dilakukan dengan cara-cara yang mencederai prinsip dan asas-asas pemilihan yang secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Bahwa perolehan suara 2.658 suara yang didapat oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 di 25 TPS Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara, lokasi TPS tersebut berada di area atau kawasan perkebunan, yakni TPS 009, TPS 010 dan seterusnya dianggap dibacakan.

Bahwa di 25 TPS yang terdapat di area perkebunan, sebagaimana tersebut di atas, sangatlah tertutup dari pihak luar, Yang Mulia. Sehingga dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu diduga terjadi mobilisasi pemilih dari pihak perkebunan untuk kepentingan Pasangan Calon Nomor Urut 2. Rekayasa atau pemalsuan Formulir Model C Hasil Salinan KWK yang diduga dilakukan oleh oknum KPPS atau oknum yang bekerja sama dan terlibat dalam kegiatan pemungutan dan penghitungan suara, sehingga menyebabkan kerugian kepada perolehan suara Pemohon.

Enam. Bahwa dugaan yang dilakukan di 25 TPS di Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara, dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif, sebagaimana terlihat di dalam bukti yang Pemohon sampaikan, di antaranya: Bukti P-12 sampai dengan Bukti P-45. Dimana di dalam DPT tersebut alamat pemilih tidak sama dengan alamat TPS tempat dilakukannya pemilihan. Hal ini dikarenakan Termohon diduga tidak melakukan cokolit terlebih dahulu undangan yang tidak dibagikan kepada pemilih, melainkan dititipkan kepada mandor pabrik untuk dibagikan, sehingga banyak pemilih Pemohon yang tidak mendapatkan undangan dan tidak memilih.

Akan tetapi anehnya, di beberapa TPS, sebagaimana tersebut di atas, total suara sah, suara tidak sah, justru melebihi DPT dan ketentuan

mengenai DPTb. Selain itu, Termohon juga melakukan pergantian beberapa anggota KPPS dengan karyawan pabrik, seminggu sebelum pemilihan.

Dan terakhir, disempurnakan dengan Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu yang tidak menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pengawas pemilihan.

Selanjutnya, tindakan tersebut dapat terlihat terang dan jelas sebagaimana uraian disampaikan di dalam Permohonan Pemohon, dimana Pasangan Calon Nomor Urut 2 menang di 25 TPS yang berada di perkebunan dengan perolehan suara rata-rata 90% suara di setiap TPS dimaksud.

Hal ini jauh berbeda dengan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 di 9 TPS Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara yang pemilihannya berada di luar area perkebunan. Perolehan suara justru berimbang untuk ketiga pasangan calon. Bahwa atas hal tersebut sebenarnya, Pemohon telah mengajukan keberatan kepada PPK Kecamatan Tambusai Utara pada saat dilakukan rekapitulasi tingkat kecamatan pada tanggal 12 Desember 2020, dianggap dibacakan seterusnya.

Bahwa keberatan tersebut Pemohon sudah meminta kepada Termohon untuk membatalkan seluruh hasil perolehan suara di 25 TPS yang berada di area perkebunan dan melakukan pemungutan dan penghitungan suara ulang di Desa Tamburai ... Tambusai Utara dan tidak lagi dilakukan di lingkungan perusahaan atau kompleks perkebunan.

Selanjutnya bahwa Pemohon juga mengajukan keberatan terhadap Termohon terkait pelaksanaan pemilihan di Desa Tambusai Utara pada saat rekapitulasi tingkat kabupaten pada tanggal 16 Desember 2020, sebagaimana telah dituangkan dalam Model D kejadian khusus kabupaten/kota KWK. Terkait hal ini, Pemohon sebenarnya telah berulang kali mengingatkan Termohon dan Bawaslu untuk dapat bekerja secara profesional dan bersungguh-sungguh dalam menyelenggarakan pemilihan, khususnya di Desa Tambusai Utara.

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk dapat memeriksa dan mengadili proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020, khususnya di 25 TPS yang berada di dalam areal perkebunan Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara.

V. Petitum

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

2. Membatalkan seluruh perolehan suara sah Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada 25 TPS, sebagaimana yang telah disebut di atas dan di TPS-TPS seperti Pemohon dalilkan.

Untuk poin nomor 3 dan poin nomor 4, Yang Mulia, Kami mohon untuk direnvoi.

95. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

3 dan 4, ya?

96. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 70/PHP.BUP-XIX/2021: MELISA ANGGRAINI

Ya.

97. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Silakan di bagian mananya?

98. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 70/PHP.BUP-XIX/2021: MELISA ANGGRAINI

Poin 3 dan 4 direnvoi untuk dicoret semuanya, Yang Mulia.

99. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Oh dihilangkan, ya?

100. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 70/PHP.BUP-XIX/2021: MELISA ANGGRAINI

Baik, Yang Mulia. Poin selanjutnya (...)

101. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Berarti yang 5 jadi 3, ya?

102. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 70/PHP.BUP-XIX/2021: MELISA ANGGRAINI

Baik, Yang Mulia benar.

3. Menyatakan tidak sah dan batal Keputusan KPU Rokan Hulu Nomor 620/PL.02.6/Kpt-1406/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Rokan Hulu Tahun 2020, tertanggal 16 Desember 2020 yang diumumkan pada hari Selasa, tanggal 16 Desember 2020.

Izin, Yang Mulia, untuk poin yang tadi menjadi 3, direnvoi, Yang Mulia, yang poin b itu menjadi poin selanjutnya, atau poin 4, Yang Mulia.

103. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Poin b jadi poin 4?

104. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 70/PHP.BUP-XIX/2021: MELISA ANGGRAINI

Baik, Yang Mulia.

105. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Berarti yang ini tidak ada a, ya?

106. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 70/PHP.BUP-XIX/2021: MELISA ANGGRAINI

Ya, tidak ada, Yang Mulia.

107. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Jadi a-nya dihilangkan. Poin b jadi?

108. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 70/PHP.BUP-XIX/2021: MELISA ANGGRAINI

4.

109. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

4.

110. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 70/PHP.BUP-XIX/2021: MELISA ANGGRAINI

Baik.

4. Hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu bahwa Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu dalam pemilihan di tingkat Kabupaten dengan Nomor Urut 3 atas nama Ir. H. Hafith Syukri dan H. Erizal, S.T. Sebagai memperoleh suara sah terbesar 90.246 suara dan Pasangan Nomor Urut 2 atas nama

H. Sukiman dan H. Indra Gunawan dengan perolehan sebanyak 89.736 suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020.

5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). Izin lagi, Yang Mulia.

111. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Ya.

112. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 70/PHP.BUP-XIX/2021: MELISA ANGGRAINI

Untuk halaman 7 di permohonan,

113. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Halaman 7?

114. KETUA: ASWANTO

Yang mana?

115. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Permohonan yang mana, nih? Yang pertama atau yang perbaikan? Kalau resume-nya kan kami belum (...)

116. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 70/PHP.BUP-XIX/2021: MELISA ANGGRAINI

Yang pertama, Yang Mulia.

117. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Yang pertama. Halaman 7, ya?

118. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 70/PHP.BUP-XIX/2021: MELISA ANGGRAINI

Halaman 7, Yang Mulia. Dalam tenggang waktu pengajuan permohonan.

119. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Oke.

120. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 70/PHP.BUP-XIX/2021: MELISA ANGGRAINI

Itu ada kesalahan typo, Yang Mulia. Nomor putusannya benar, keterangannya juga benar, hanya kelebihan kalimat, Yang Mulia, ada tulisan kalimat tengahnya, Yang Mulia.

121. KETUA: ASWANTO

Kalimantan Tengah?

122. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 70/PHP.BUP-XIX/2021: MELISA ANGGRAINI

Ya. Itu direnvoi untuk dihapus, Yang Mulia.

123. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Ditenggang waktu itu, ya? Kalimantan Tengah dihapus?

124. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 70/PHP.BUP-XIX/2021: MELISA ANGGRAINI

Iya, Yang Mulia.

125. AKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Oke. Sudah?

126. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 70/PHP.BUP-XIX/2021: MELISA ANGGRAINI

Demikian, Yang Mulia. Terima kasih, hormat kami Kuasa Hukum Pemohon. Cukup, Yang Mulia.

127. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Baik. Saya ingin klarifikasi dulu. Tadi dipetitumnya, 3 dan 4 dihapus?

128. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 70/PHP.BUP-XIX/2021: MELISA ANGGRAINI

Ya.

129. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Sehingga yang 5 ini kan jadi 3. 5 ini menyatakan tidak sah dan batal ini ada A dan B. Itu tetap?

130. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 70/PHP.BUP-XIX/2021: MELISA ANGGRAINI

Yang 3 tidak pakai A, yang B-nya jadi poin 4.

131. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Bukan di ... yang saya pegang ini ada B-nya 2 kali ini. Jadi yang A-nya itu Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hulu dengan Nomor 620 dan seterusnya. B-nya ini Surat KPU Kabupaten Rokan Hulu Nomor 776 dan seterusnya. Kemudian ada B lagi, menetapkan hasil penghitungan suara.

132. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 70/PHP.BUP-XIX/2021: MELISA ANGGRAINI

Yang poin nomor 5, Yang Mulia.

133. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Bukan, yang tadinya 5 itu kan menjadi 3?

134. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 70/PHP.BUP-XIX/2021: MELISA ANGGRAINI

Ya.

135. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Nah, 3 ini ada A dan B dalam (...)

136. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 70/PHP.BUP-XIX/2021: MELISA ANGGRAINI

Yang A-nya dihilangkan, Yang Mulia.

137. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Terus?

138. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 70/PHP.BUP-XIX/2021: MELISA ANGGRAINI

Yang B-nya menjadi poin nomor 4.

139. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Bukan. Gini, B ini ada 2, di dokumen yang kami pegang ini (...)

140. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 70/PHP.BUP-XIX/2021: MELISA ANGGRAINI

Oh, yang di sini, di bawahnya itu 6, Yang Mulia. 6.

141. KETUA: ASWANTO

Yang diperbaiki, yang diawal habis.

142. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Oh, sori. Ini yang ini diperbaikannya ada A, B, dan B?

143. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 70/PHP.BUP-XIX/2021: MELISA ANGGRAINI

Di yang permohonan awal, Yang Mulia.

144. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Oh, oke.

145. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 70/PHP.BUP-XIX/2021: MELISA ANGGRAINI

Baik.

146. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Baik, Terima kasih. Nanti Termohon, Bawaslu juga nanti Pihak Terkait dokumen yang ada nanti bisa ditanggapi, dalam catatan kami

perbaikannya ini, sudah lewat waktu, ya. Kami serahkan sepenuhnya kepada Termohon, Bawaslu, dan Pihak Terkait untuk menanggapi itu, ya. Mungkin ada masukan dari Yang Mulia, Pak Suhartoyo? Silakan.

147. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Sedikit saya, Pak Daniel. Ibu yang direnvoi ... Ibu tadi membacakan itu yang permohonan awal atau yang perbaikan?

148. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 70/PHP.BUP-XIX/2021: MELISA ANGGRAINI

Yang awal, Yang Mulia.

149. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Yang awal?

150. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 70/PHP.BUP-XIX/2021: MELISA ANGGRAINI

Yang awal. Karena yang perbaikan sudah lewat waktu, Yang Mulia, jadi (...)

151. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Lewat waktu, yang lewat waktu ... terus yang di-resume itu adalah permohonan yang awal?

152. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 70/PHP.BUP-XIX/2021: MELISA ANGGRAINI

Benar, Yang Mulia.

153. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Baik. Berarti halaman 7 ... tadi saya minta ... saya minta diulang karena halaman 7 tadi Gubernur Kalimantan Tengah ini coret, ya?

154. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 70/PHP.BUP-XIX/2021: MELISA ANGGRAINI

Ya, itu saja, Yang Mulia. Yang lainnya benar, Yang Mulia. Kelebihan kalimat, Yang Mulia.

155. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Kelebihan kalimat atau ada orderan lain?

156. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 70/PHP.BUP-XIX/2021: MELISA ANGGRAINI

He eh.

157. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Tapi ini kok ... anu ... ya, kuasa yang lama, ya?

158. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 70/PHP.BUP-XIX/2021: MELISA ANGGRAINI

Ini masih dari kuasa yang lama.

159. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Baik. Kalau mengurangi boleh, kalau renvoi yang menambah itu yang kemudian bisa menjadi ... nah, kalau yang petitum tadi, Bu?

160. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 70/PHP.BUP-XIX/2021: MELISA ANGGRAINI

Baik, Yang Mulia.

161. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Angka 3 dan angka 4 dihapus?

162. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 70/PHP.BUP-XIX/2021: MELISA ANGGRAINI

Dihapus, Yang Mulia.

163. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

3, 4, ya?

164. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 70/PHP.BUP-XIX/2021: MELISA ANGGRAINI

Ya.

165. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

3, 4 coret. Terus yang dinaikkan menjadi angka 3 yang?

166. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 70/PHP.BUP-XIX/2021: MELISA ANGGRAINI

5.

167. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

5 yang menyatakan tidak sah. Ini kan ada A, B?

168. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 70/PHP.BUP-XIX/2021: MELISA ANGGRAINI

5 ... 5 A-nya hilang. Menjadi 1 poin.

169. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

5-nya hilang (...)

170. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 70/PHP.BUP-XIX/2021: MELISA ANGGRAINI

Jadi 3 (...)

171. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ininya jadi angka 5? Angka 3?

172. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 70/PHP.BUP-XIX/2021: MELISA ANGGRAINI

B-nya menjadi poin 4.

173. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Sebentar. Kan angka 3 sama 4 dicoret?

174. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 70/PHP.BUP-XIX/2021: MELISA ANGGRAINI

Baik. Yang 5 jadi 3, Yang Mulia.

175. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

4. Menyatakan tidak sah dan batal, kan?

176. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 70/PHP.BUP-XIX/2021: MELISA ANGGRAINI

Ya, itu menjadi (...)

177. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Jadi angka 3?

178. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 70/PHP.BUP-XIX/2021: MELISA ANGGRAINI

Yang b-nya menjadi poin selanjutnya.

179. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Angka ... bukan, nanti dulu. Yang angka 3 menyatakan tidak sah dan batal, isinya yang mana? Yang minta batal itu yang mana? Yang a atau yang b yang dipertahankan?

180. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 70/PHP.BUP-XIX/2021: MELISA ANGGRAINI

Yang a, Yang Mulia.

181. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Loh, katanya tadi a dicoret? Jadi 3 ini menyatakan tidak sah dan batal, ya?

182. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 70/PHP.BUP-XIX/2021: MELISA ANGGRAINI

Benar, Yang Mulia.

183. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Titik dua (...)

184. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 70/PHP.BUP-XIX/2021: MELISA ANGGRAINI

Ya (...)

185. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

A dan b. Mana yang dipakai untuk angka 3?

186. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 70/PHP.BUP-XIX/2021: MELISA ANGGRAINI

A.

187. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

A. Karena ini kan, selisih perolehan suara kan tipis ini, kan?

188. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 70/PHP.BUP-XIX/2021: MELISA ANGGRAINI

Benar, Yang Mulia.

189. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Memang agak perlu kecermatan, perlu ... anu ... apa. Terus, yang b mau diapakan?

190. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 70/PHP.BUP-XIX/2021: MELISA ANGGRAINI

Menjadi poin selanjutnya, Yang Mulia.

191. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Jadi poin 4?

192. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 70/PHP.BUP-XIX/2021: MELISA ANGGRAINI

Benar.

193. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Poin 4. Terus yang 6 jadi 5?

194. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 70/PHP.BUP-XIX/2021: MELISA ANGGRAINI

Benar, Yang Mulia.

195. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oke, nanti di ... apa ... diperhatikan ini. Karena ... terus, saya ingin penegasan, 25 TPS yang ada di perkebunan tadi, Tambusai itu, ada pengaduan?

196. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 70/PHP.BUP-XIX/2021: MELISA ANGGRAINI

Ada saksi dan bukti surat (...)

197. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ada pengaduan ke (...)

198. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 70/PHP.BUP-XIX/2021: MELISA ANGGRAINI

Ada keberatan. Ada, Yang Mulia.

199. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Di (...)

200. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 70/PHP.BUP-XIX/2021: MELISA ANGGRAINI

Desa Tambusai (...)

201. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ada dokumennya?

202. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 70/PHP.BUP-XIX/2021: MELISA ANGGRAINI

Ada, Yang Mulia.

203. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Terus, ada rekomendasi-rekomendasi untuk (...)

204. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 70/PHP.BUP-XIX/2021: MELISA ANGGRAINI

Belum ada, Yang Mulia.

205. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Belum ada? Sudah mendapat penjelasan dari KPU maupun Bawaslu, pengaduan itu bagaimana nasibnya, tindak lanjutnya?

206. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 70/PHP.BUP-XIX/2021: MELISA ANGGRAINI

Sebagian besar tidak ditindaklanjuti, tapi tidak dijadikan temuan juga, Yang Mulia.

207. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, alasannya apa? Karena (...)

208. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 70/PHP.BUP-XIX/2021: MELISA ANGGRAINI

Tidak terpenuhi unsur sebagian besarnya.

209. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ada surat balasan?

210. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 70/PHP.BUP-XIX/2021: MELISA ANGGRAINI

Ada, Yang Mulia.

211. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Rekapnya dari KPU?

212. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 70/PHP.BUP-XIX/2021: MELISA ANGGRAINI

Ya, nanti ... jika diperkenankan, nanti juga ada saksi-saksi yang menerangkan dokumen-dokumen (...)

213. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, saksi itu kan me-back up surat biasanya.

214. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 70/PHP.BUP-XIX/2021: MELISA ANGGRAINI

Ya, benar.

215. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ada enggak produk dari KPU, Bawaslu yang menjelaskan 25 yang di perkebunan. Ini kan persoalan mendasar yang Ibu persoalkan kan tidak jauh dari itu, sekitar itu, kan?

216. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 70/PHP.BUP-XIX/2021: MELISA ANGGRAINI

Ya, benar, Yang Mulia.

217. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ada bukti laporan dan bukti jawaban dari KPU dan Bawaslu?

218. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 70/PHP.BUP-XIX/2021: MELISA ANGGRAINI

Ada, Yang Mulia.

219. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ada, nanti dibuktikan, ya! Oke, terima kasih, Pak Daniel dan Pak Ketua Panel.

220. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Pak Suhartoyo.
Untuk Permohonan Perkara Nomor 70/PHP.BUP-XIX/2021 ini, sidang berikut akan dilaksanakan pada hari Kamis, 4 Februari 2021,

pukul 13.30 WIB. Saya ulangi, ya. Penundaan sidangnya hari Kamis, 4 Februari 2021, pukul 13.30 WIB dengan acara menerima dan mendengar jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, dan Bawaslu, memeriksa dan mengesahkan alat bukti.

Nah, dalam Permohonan ini, ada Pihak Terkait yang mengajukan permohonan, Mahkamah sudah menerima. Dan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim, permohonan sebagai Pihak Terkait itu diterima, yang diajukan oleh H. Sukiman dan H. Indra Gunawan. Apakah Kuasa Pihak Terkait ada? Oke. Nanti untuk status sebagai Pihak Terkait ada penetapan, nanti setelah sidang akan diberikan oleh bagian Kepaniteraan.

221. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT:

Baik, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia.

222. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Nah, penundaan sidang ini hari Kamis, ini merupakan panggilan sidang dari Mahkamah untuk sidang berikutnya. Jadi, kalau nanti ada surat panggilan lagi, walaupun surat itu tidak sampai, penundaan sidang ini sudah ... panggilan ini sudah dianggap sebagai panggilan resmi, ya.

Selanjutnya, untuk pengesahan alat bukti, saya serahkan kepada Yang Mulia Pak Ketua.

223. KETUA: ASWANTO

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Sekali lagi ya untuk para pihak, penyampaian tadi sekaligus sebagai panggilan resmi.

Perkara Nomor 70/PHP.BUP-XIX/2021 memasukkan Bukti P-1 sampai dengan P-78. Betul, ya?

224. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 70/PHP.BUP-XIX/2021: MELISA ANGGRAINI

Betul, Yang Mulia.

225. KETUA: ASWANTO

P-1 sampai dengan P-78 sudah diverifikasi, lengkap.

KETUK PALU 1X

Ada catatan, Pemohon belum menyerahkan softcopy permohonan awal. Nanti diserahkan, ya.

226. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 70/PHP.BUP-XIX/2021: MELISA ANGGRAINI

Baik, Yang Mulia. Selanjutnya diserahkan.

227. KETUA: ASWANTO

Kemudian juga daftar alat bukti juga belum ada softcopy-nya. Nanti dilengkapi, ya.

228. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 70/PHP.BUP-XIX/2021: MELISA ANGGRAINI

Dilengkapi, Yang Mulia.

229. KETUA: ASWANTO

Baik. Silakan, Yang Mulia.

230. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Baik, terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua. Pemohon Nomor 70/PHP.BUP-XIX/2021, Pihak Terkait, Bawaslu, dan Termohon bisa meninggalkan ruangan dalam rangka penerapan protokol kesehatan, dipersilakan untuk meninggalkan ruangan. Khusus Pihak Terkait nanti untuk penetapan sebagai Pihak Terkait nanti akan dibantu oleh Kepaniteraan.

Selanjutnya kita akan mendengar penyampaian pokok-pokok permohonan dari Pemohon Nomor 85/PHP.BUP-XIX/2021 Kabupaten Rokan Hilir, silakan.

231. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 85/PHP.BUP-XIX/2021: ASWANDI

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Bismillahirrahmaanirrahiim.

Hal perbaikan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir Nomor 223/HK.03.1/Kpt/1407/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020.

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi. Yang bertanda tangan di bawah ini. Satu, nama Suyatno dengan segala identitasnya. Dua, nama Jamiludin dengan segala identitasnya adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2020 sesuai Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir Nomor 178/PL.02.3-Kpt/1407/KPU-Kab/IX/2020, tanggal 23 September 2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2020. Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 530/SK-AR/XII/2020, tanggal 19 Desember 2020. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Asep Ruhiat, S.Ag., S.H., M.H. and partner. Kesemuanya adalah para advokat atau pengacara pada Kantor Hukum Asep Ruhiat and Partners yang beralamat dan berkantor di jalan Handayani Nomor 369 C Arengka Atas Pekanbaru, Provinsi Riau. Baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa selanjutnya disebut Pemohon.

Terhadap Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir berkedudukan di Bagan Punak Pesisir, Bangko Kabupaten Rokan Hilir selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Dalam hal ini mengajukan perbaikan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir Nomor 223/HK.03.1/Kpt/1407/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020 Pukul 20.51 WIB.

- I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi kami anggap dibacakan.
- II. Kedudukan hukum Pemohon.
 - a. Bahwa berdasarkan Pasal 4 huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menyatakan Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah pasangan calon bupati dan wakil bupati.
 - b. Bahwa Suyatno dan Jamiludin selaku Pemohon adalah peserta Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (...)

232. KETUA: ASWANTO

Sebentar, Mas. Ini kan kalau menurut catatan kami permohonan awal Saudara lewat waktu.

233. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 85/PHP.BUP-XIX/2021: ASWANDI

Ya, Yang Mulia.

234. KETUA: ASWANTO

Ini perlu konfirmasi ke KPU. KPU menetapkan tanggal berapa?

235. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 85/PHP.BUP-XIX/2021: SURYADI

Mohon izin, Yang Mulia. KPU menetapkan di tanggal 16 Desember.

236. KETUA: ASWANTO

Tanggal 16. Permohonan Saudara masuk tanggal berapa?

237. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 85/PHP.BUP-XIX/2021: ASWANDI

Permohonan awal masuknya tanggal 20, Yang Mulia.

238. KETUA: ASWANTO

20. Pasal 157 ayat (5) pengumuman ... pengajuan permohonan itu 3 hari setelah pengumuman, 3 hari kerja (...)

239. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 85/PHP.BUP-XIX/2021: ASWANDI

Mohon maaf, Yang Mulia. Untuk tanggal ... dari tanggal 16 itu ke 17 masih hari kerja, tanggal berikutnya itu tidak termasuk hari kerja, Yang Mulia.

240. KETUA: ASWANTO

Di ini lho, di ... apa namanya ... dilihat baik-baik normanya, Mas. Nah, KPU diumumkan, enggak?

241. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 85/PHP.BUP-XIX/2021: ASWANDI

Izin, Yang Mulia. Pada saat penetapan, itu juga langsung diumumkan dan ditempel di papan pengumuman kantor KPU.

242. KETUA: ASWANTO

Oke, ditempel di papan pengumuman?

243. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 85/PHP.BUP-XIX/2021: ASWANDI

Ya.

244. KETUA: ASWANTO

Di-upload enggak di laman KPU?

245. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 85/PHP.BUP-XIX/2021: ASWANDI

Ya, di-upload.

246. KETUA: ASWANTO

Tanggal berapa di-upload?

247. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 85/PHP.BUP-XIX/2021: ASWANDI

Di-upload pada tanggal 16 Desember juga.

248. KETUA: ASWANTO

Ada buktinya itu bahwa begitu selesai ditetapkan, ditempel di papan pengumuman KPU, kemudian di-upload di laman KPU?

249. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 85/PHP.BUP-XIX/2021: ASWANDI

Siap, Yang Mulia. Kita ada bukti dan akan kita hadirkan sebagai bukti.

250. KETUA: ASWANTO

Ada buktinya, ya? Karena normanya, Pasal 15 ... apa namanya ... Pasal 157 ... Pasal 153 ayat (5) itu ... Pasal 157 ayat (5), yang dihitung untuk menghitung tiga hari itu adalah pengumuman. Dan pengumumannya dua, di laman KPU, dan papan KPU, gitu lho.

251. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 85/PHP.BUP-XIX/2021: ASWANDI

Siap, Yang Mulia.

252. KETUA: ASWANTO

Nah, gitu. Tapi kalau menurut Pemohon, itu belum lewat waktu?

253. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 85/PHP.BUP-XIX/2021: ASWANDI

Kalau menurut kami, Yang Mulia, belum, Yang Mulia. Karena untuk tanggal 19 dan 20 itu bukan jam kerja, Yang Mulia. Karena itu jatuh pada hari Sabtu dan Minggu, Yang Mulia.

254. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Sebentar, Prof, izin.

Kan tanggal 16 itu hari Rabu ... hari ... hari Rabu, ya? Hari Rabu ... hari Rabu. Sejak, bukan setelah. Jadi begitu ditetapkan, misalnya ditetapkan jam berapa, Pak KPU?

255. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 85/PHP.BUP-XIX/2021: ASWANDI

Jam 20.51 WIB.

256. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Jam?

257. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 85/PHP.BUP-XIX/2021: ASWANDI

Jam 20.51 WIB.

258. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

20.51 WIB. Sejak pukul 20.51 WIB, lewat 1 detik, itu sudah berlaku masa ... masa tenggang waktu untuk mengajukan permohonan. Jadi, kalau itu hari Rabu, sisanya ya tinggal pukul 21.00 WIB, pukul 22.00, pukul 24.00 WIB.

259. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 85/PHP.BUP-XIX/2021: ASWANDI

Siap, Yang Mulia.

260. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Hari keduanya di Kamis, Kamis. Hari ketiganya, Jumat. Jumat, tidak dibatasi hari kerja, tapi Bapak punya waktu sampai jam 24.00 WIB. Kompensasinya pukul 00.00 WIB. Jadi, bukan Jumat Bapak terbentur Sabtu dan Minggu. Tidak ketemu itu, Pak. Karena sejak, bukan setelah menghitungnya. Nanti dibaca lagi undang-undang dan PMK-nya.

261. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 85/PHP.BUP-XIX/2021: ASWANDI

Siap, Yang Mulia.

262. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Nah, oleh karena itu, menurut catatan dari Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Bapak mengajukan tanggal 20 itu sudah terlambat. Fisiknya bahkan baru diajukan tanggal 23. Fisik perbaikan maupun ... perbaikan maupun permohonan yang online. Bapak kan pertama online, kan?

263. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 85/PHP.BUP-XIX/2021: ASWANDI

Siap, ya, Yang Mulia.

264. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Jadi, oleh karena itu, Pak Ketua dan Pak Daniel kepada Pemohon Rokan Hilir, terserah karena sudah ... menurut catatan Mahkamah kan, dari awal memang sudah dideteksi bahwa itu lewat waktu. Apalagi yang perbaikan. Oleh karena itu, ada keleluasaan Saudara untuk menyampaikan yang mana? Karena dua-duanya sudah ... memang sudah

lewat waktu. Kalau mau diajukan ... apa ... mau disampaikan yang seperti yang perbaikan. Anda juga ... Mahkamah tidak bisa memaksa untuk kembali ke yang awal, tapi nanti respons KPU terserah bagaimana. Karena KPU juga mengerti tentunya tentang tenggang waktu itu. Tentang tata cara beracara di MK, dia tahu.

265. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 85/PHP.BUP-XIX/2021: ASWANDI

Siap, Yang Mulia.

266. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Kalau ada keberatan, Mahkamah yang akan menilai. Ya.

267. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 85/PHP.BUP-XIX/2021: ASWANDI

Siap, Yang Mulia.

268. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Supaya tahu ini bahwa permohonan Saudara, menurut catatan Mahkamah Konstitusi sejak pendaftarannya sudah melewati tenggang waktu itu.

269. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 85/PHP.BUP-XIX/2021: ASWANDI

Siap, Yang Mulia.

270. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Pak Ketua itu Pak Ketua.

271. KETUA: ASWANTO

Baik, sebelum ke Yang Mulia Pak Daniel, tolong nanti Saudara cermati normanya, di normanya itu untuk menghitung tiga hari itu sejak pemu ... apa ... sejak pengumuman.

272. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 85/PHP.BUP-XIX/2021: ASWANDI

Siap, Yang Mulia.

273. KETUA: ASWANTO

Nah, nanti ... tadi saya sudah konfirmasi ke KPU, apakah setelah ditetapkan itu langsung dimasukkan ke laman KPU atau tidak? Jawabannya, ya. Langsung masuk di laman KPU. Karena pengumuman yang dimaksud di undang-undang itu adalah diumumkan di laman KPU, dan di papan KPU. Ada beberapa perkara yang memang diumumkan, tapi diumumkan di medsos, bukan di laman KPU. Yang dihitung itu adalah laman KPU, jadi nanti Saudara boleh cek, cek nanti, apakah betul KPU sudah memasukkan di laman KPU, setelah penetapan itu? Jangan-jangan dua tiga hari baru dimasukkan di laman KPU? Atau jangan-jangan sampai sekarang ndak ada di laman KPU?

274. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 85/PHP.BUP-XIX/2021: ASWANDI

Siap, Yang Mulia.

275. KETUA: ASWANTO

Kemarin ada kami konfirmasi, dia mengatakan ... KPU mengatakan, "Sudah diumumkan, tapi di media sosial." Bukan itu! Diumumkan itu adalah di laman dan ... jadi ada dua, Pak, di laman dan di papan. Nah, Saudara bisa cek nanti itu.

276. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 85/PHP.BUP-XIX/2021: ASWANDI

Siap, Yang Mulia.

277. KETUA: ASWANTO

Tinggal pilihan sekarang, Saudara mau baca yang mana? Teruskan yang mana?

278. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 85/PHP.BUP-XIX/2021: ASWANDI

Yang (...)

279. KETUA: ASWANTO

Yang mana yang mau Saudara teruskan?

280. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 85/PHP.BUP-XIX/2021: ASWANDI

Yang perbaikan saja, Yang Mulia.

281. KETUA: ASWANTO

Yang perbaikan saja, silakan. Enggak usah dibaca secara keseluruhan.

282. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 85/PHP.BUP-XIX/2021: ASWANDI

Siap, Yang Mulia.

283. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Silakan dilanjutkan. Dipertimbangkan soal waktu, ya. Karena waktunya 15 menit, silakan.

284. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 85/PHP.BUP-XIX/2021: ASWANDI

III. Tenggang Waktu Pengajuan Perbaikan Permohonan

a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 juncto Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 tahun 2020, yang pada pokoknya menyatakan permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU kabupaten.

b. Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir Nomor 223/HK.03.1/Kpt/1407/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir Tahun 2020, pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2020, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 87/PAN.MK/AP3/12/2020, tertanggal 21 Desember 2020.

285. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Izin, Pak Daniel. Itu yang barusan Anda baca, ya, penetapan tanggal 20. Ini barusan Anda baca tadi, kan? Itu data dari mana? Kalau KPU tanggal 16. Itu tugas Bapak nanti untuk mengecek yang dimaksud Pak Ketua Panel tadi diumumkan kapan.

286. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 85/PHP.BUP-XIX/2021: ASWANDI

Siap, Yang Mulia.

287. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Kalau tanggal 20 menurut versi Saudara. Yang ada di permohonan ini, ya, Saudara mengajukan tanggal 20 lewat online, ya, tidak terlambat. Tapi KPU, kan tanggal 16. Ini benar, kan? Ini yang buat siapa permohonan?

288. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 85/PHP.BUP-XIX/2021: ASWANDI

Izin, Yang Mulia. Yang untuk tanggal 20 itu masuknya permohonan kami, Yang Mulia.

289. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya. Ini kan penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan hasil pemilihan bupati itu pada hari Minggu, tanggal 20 Desember. Anda sudah mengajukan permohonan, kan?

290. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 85/PHP.BUP-XIX/2021: ASWANDI

Benar, Yang Mulia.

291. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Nah, sedangkan tanggal 16 versinya Pemohon ... Termohon, sudah ditetapkan. Padahal di angka a-nya ... di huruf a-nya, Saudara mengatakan sejak. Mengakui kalau sejak, kan?

292. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 85/PHP.BUP-XIX/2021: ASWANDI

Siap, Yang Mulia.

293. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Nah, itu yang disampaikan Pak Ketua tadi, nanti dihitung benar tidak. Kalau memang Anda nanti bisa membuktikan di sidang yang akan datang bahwa diumumkan ternyata tidak seperti yang disampaikan

KPU, Saudara nanti bisa kami pertimbangkan keterlambatan itu benar atau tidak.

294. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 85/PHP.BUP-XIX/2021: ASWANDI

Siap, Yang Mulia.

295. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, itu penting, ya.

296. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 85/PHP.BUP-XIX/2021: ASWANDI

Siap, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia.

297. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Cukup, Pak Daniel.

298. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Silakan dilanjutkan. Masuk pokok permohonan saja.

299. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 85/PHP.BUP-XIX/2021: ASWANDI

Siap, Yang Mulia.

IV. Pokok Permohonan

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut.

1. Cutra Andika, S.H., - Muhammad Rafik, S.Agg perolehan suara sebanyak 19.831 suara.

2. H. Suyatno – Drs. H. Jamiludin yaitu Pemohon, perolehan suara sebanyak 85.059 suara

3. H. Asri Auzar – H. Fuad Ahmad, S.H. perolehan suara sebanyak 76.521 suara

4. Afrizal Sintong – H. Sulaiman, S.S., M.H. perolehan suara sebanyak 94.515 suara

Dengan total suara sah sebesar 275.926 suara. Berdasarkan tabel di atas, Pemohon berada di peringkat kedua dengan perolehan suara sebanyak 85.059 suara. Untuk poin 2, 3, 4 dianggap dibacakan.

Selanjutnya 5. Bahwa hasil penghitungan yang dilakukan oleh Termohon dihasilkan dari suatu proses pemilu yang bertentangan asas pemilu yang luber jurdil.

Oleh karena itu, suara yang diperoleh oleh pemenang yang ditetapkan oleh Termohon bukan merupakan cerminan dari aspirasi dan kedaulatan rakyat yang genuine, tetapi karena pemberian janji-janji kepada pemilih yang luar biasa, politik identitas, ujaran kebencian, dan berkuasanya politik uang, serta keterlibatan ASN/staf kecamatan dalam proses kampanye Nomor Urut 4 dan/atau setidak-tidaknya, pemilukada yang terselenggara tanggal 9 Desember 2020 di Kabupaten Rokan Hilir merupakan pemilukada dipenuhi begitu banyak pelanggaran dan tindak kecurangan yang dapat dikualifikasi sebagai masif, sistematis, dan terstruktur.

Pemilukada yang dihasilkan dari proses tersebut di atas merupakan penyelenggaraan pemilukada yang tidak benar dan/atau setidak-tidaknya terdapat dan dapat dikualifikasi sebagai pelanggaran serius dan kekeliruan, serta mempunyai kaitan langsung dan mempengaruhi rekapitulasi hasil perhitungan suara, khususnya perolehan suara Pemohon. Untuk 6, 7, 8, dianggap dibacakan.

Selanjutnya 9. Bahwa yang menjadi perbaikan dalam permohonan pembatalan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir Nomor 223/HK.03.1/Kpt/1407/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

a. Kegiatan kampanye yang dilakukan oleh Pasangan Nomor Urut 4 tidak menggunakan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) kampanye dari pihak yang berwenang yang terjadi di ... kampanye pada hari Kamis, tanggal 22 Oktober 2020, yang bertempat di Jalan Kecamatan Bagan Punak, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, vide Bukti 4 ... Bukti P-4.

b. Adanya keterlibatan ASN/staf kecamatan dalam proses kampanye Nomor Urut 4 dan/atau setidak-tidaknya vide Bukti P-5:

1. Bahwa salah satu istri Pasangan Calon Nomor Urut 4 yang merupakan staf (...)

300. KETUA: ASWANTO

Pemohon, itu enggak usah dibacakan anunya ... poin besarnya saja, ada keterlibatan ASN (...)

301. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 85/PHP.BUP-XIX/2021: ASWANDI

Siap, Yang Mulia.

302. KETUA: ASWANTO

Nanti kami yang memeriksa itu.

303. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 85/PHP.BUP-XIX/2021: ASWANDI

Siap, Yang Mulia.

304. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Langsung ke c-nya saja halaman 13.

305. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 85/PHP.BUP-XIX/2021: ASWANDI

c. Dugaan terjadinya money politics yang dilakukan oleh Pasangan Nomor Urut 4 dan janji-janji pemberian sesuatu oleh Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 4 dengan pemberian kartu Aman kepada para pemilih yang ada di Kabupaten Rokan Hilir, vide Bukti P-18, P-19 video P-20, video P-21.

306. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Silakan, misalnya di Kecamatan Tanah Putih, di Kecamatan Rimba Melintang.

307. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 85/PHP.BUP-XIX/2021: ASWANDI

Siap, Yang Mulia.

308. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Enggak usah diuraikan, tapi (...)

309. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 85/PHP.BUP-XIX/2021: ASWANDI

Siap, Yang Mulia.

Bahwa pemberian kartu Aman tersebut diiringi dengan permintaan kepada pemilih apabila memilih Pasangan Nomor Urut 4, maka akan diberikan dana bantuan langsung tunai sebesar Rp250.000,00 per bulan kepada masing-masing penerima kartu yang dimulai sebulan setelah dilantik, sampai Pasangan Nomor 4 menjabat

sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir, sehingga janji-janji tersebut jelas mengarahkan pemilih untuk memilih Pasangan Nomor Urut 4 yang berpengaruh kepada perolehan suara Pemohon, sebagaimana keterangan penerima kartu Aman di beberapa kecamatan sebagai berikut:

1. Kecamatan Tanah Putih
2. Kecamatan Rimba Melintang
3. Kecamatan Bangko
4. Kecamatan Sinaboi
5. Kecamatan Pujud.

Selanjutnya di, dugaan black campaign/kampanye hitam dan ujaran kebencian di media sosial yang diduga dilakukan oleh Tim Pasangan Nomor Urut 4 menyerang pribadi Calon Bupati/Pemohon dan SARA.

Bahwa oleh karena itu, kami memohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia menyatakan tidak sah dan batal serta tidak mengikat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir Nomor 223/HK.03.1/Kpt/1407/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir Tahun 2020.

V. Petitum

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir Nomor 223/HK.03.1/Kpt/1407/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir Tahun 2020 tanggal 16 Desember 2020 yang diumumkan pada hari Rabu, tanggal 16 Desember 2020.
3. Mendiskualifikasi Pasangan Nomor Urut 4 sebagai pemenang dan sebagai peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2020 dan menetapkan Pemohon sebagai pemenang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2020.
4. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan putusan ini.

Atau:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir Nomor 223/HK.03.1/Kpt/1407/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir Tahun 2020 tanggal 16 Desember 2020.

3. Memerintahkan Termohon untuk melakukan Pemilihan Suara Ulang di seluruh TPS dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir Tahun 2020.
4. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan putusan ini.
Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).
Hormat kami, Kuasa Hukum Pemohon, ditandatangani.
Terima kasih, Yang Mulia.

310. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Baik, terima kasih, Pemohon, untuk pembacaan Pokok-Pokok Permohonannya. Nanti kesempatan berikut kepada Termohon, Bawaslu dan Pihak Terkait nanti untuk menyampaikan jawaban dan keterangan pada sidang berikutnya. Mungkin ada masukan lagi dari Yang Mulia?

311. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Sedikit. Selain yang disampaikan tadi ada rekomendasi tidak untuk permohonan ini, perkara ini ada rekomendasi-rekomendasi yang dikeluarkan Bawaslu yang tidak ditindaklanjuti atau pengaduan-pengaduan yang ... ada?

312. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 85/PHP.BUP-XIX/2021: ASWANDI

Untuk sementara belum ada, Yang Mulia.

313. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Belum? Penting ini. Belum ada, ya?

314. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 85/PHP.BUP-XIX/2021: ASWANDI

Ya, Yang Mulia.

315. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oke, jadi itu saja. Jadi sekali lagi saya pesankan untuk me ... apa ... melihat penetapan KPU Rokan Hilir tanggal 16, 2021 itu di-publish di papan di tempat pengumuman dan di laman KPU kapan, ya?

316. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 85/PHP.BUP-XIX/2021: ASWANDI

Siap, Yang Mulia.

317. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Jadi, sidang yang akan datang kita konfirmasi dari Anda hasil pe-tracking-an itu dengan apa yang dijelaskan KPU, kemudian kita cross dengan bukti yang diajukan para pihak.

318. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 85/PHP.BUP-XIX/2021: ASWANDI

Siap, Yang Mulia.

319. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Itu saja Pak Ketua, Pak Daniel.

320. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Baik, Terima kasih. Penundaan sidang ini akan dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 4 Februari pukul 13.30 WIB, acara menerima dan mendengar jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, dan Bawaslu, memeriksa dan mengesahkan alat bukti. Penundaan sidang ini merupakan panggilan sidang dari Mahkamah untuk sidang berikutnya.

Nah, dalam perkara ini ada yang mengajukan permohonan sebagai Pihak Terkait, diajukan oleh Saudara Afrizal Sintong dan Saudara H. Sulaiman. Permohonan ini sudah diputuskan dalam Rapat Permasyarakatan Hakim. Permohonan ini diterima sebagai Pihak Terkait. Apakah ada yang hadir Pihak Terkait? Baik, untuk penetapan sebagai Pihak Terkait, akan diberikan dari Kepaniteraan setelah persidangan ini, ya. Sehingga pada waktu penundaan sidang berikut, tanggal 4 Februari, Anda sudah bisa hadir untuk menyampaikan keterangannya.

Baik untuk pengesahan alat bukti saya kembalikan kepada Yang Mulia Pak Ketua.

321. KETUA: ASWANTO

Baik, Terima kasih Yang Mulia. Untuk Perkara Nomor 85/PHP.BUP-XIX/2021, sesuai dengan daftar alat bukti yang Anda masukkan, Anda mempunyai bukti P-1 sampai dengan P-23?

322. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 85/PHP.BUP-XIX/2021: ASWANDI

Benar, Yang Mulia. Benar.

323. KETUA: ASWANTO

Baik, sudah diverifikasi lengkap.

KETUK PALU 1X

324. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 85/PHP.BUP-XIX/2021: ASWANDI

Terima kasih, Yang Mulia.

325. KETUA: ASWANTO

Nah, dengan demikian untuk perkara ini, Perkara Nomor 85/PHP.BUP-XIX/2021, Para Pihak sudah bisa meninggalkan ruang sidang. Silakan.

326. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 85/PHP.BUP-XIX/2021: ASWANDI

Siap. Terima kasih, Yang Mulia.

327. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Baik, terima kasih. Pemohon, Termohon, Bawaslu, dan Pihak Terkait bisa meninggalkan ruangan sidang.

Selanjutnya kita akan mendengar pembacaan pokok-pokok permohonan dari Perkara Nomor 60/PHP.BUP-XIX/2021. Untuk itu kepada kuasanya saya beri kesempatan. Silakan.

328. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 60/PHP.BUP-XIX/2021: ASEP RUHIAT

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Bismillahirrahmaanirrahiim.

Hal perbaikan permohonan pembatalan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 912/PL.02.6-Kpt/1409/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020.

Yang Mulia, Ketua Mahkamah Konstitusi, Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6, Jakarta Pusat. Yang bertanda tangan di bawah ini. 1. H. Halim, segala identitasnya (...)

329. KETUA: ASWANTO

Sebentar, sebentar. Pemohon klarifikasi dulu. Ini menurut catatan kami perbaikan Anda lewat waktu. Memang diserahkan kepada Saudara. Apa yang mau Anda baca yang perbaikan atau permohonan awal terserah Anda. Tapi sekadar informasi sesuai dengan catatan kami permohonan ... apa ... perbaikan permohonan Saudara itu sudah lewat waktu, ya. Permohonan Saudara itu AP-3 nya tanggal 18, kemudian perbaikannya masuk 23.

Nah, itu mestinya kan 3 hari kerja sejak diterbitkan AP-3. Sehingga menurut catatan kami berdasarkan bukti ini, perbaikan permohonan Saudara sudah lewat waktu. Nah tapi kembali ke Saudara, Saudara mau tetap bacakan yang lewat waktu atau mau bacakan yang permohonan awal? Silakan, Yang Mulia.

330. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 60/PHP.BUP-XIX/2021: ASEP RUHIAT

Terima kasih, Yang Mulia. Kami akan memohonkan untuk perbaikan, tapi apabila nanti dari hasil persidangannya ini tidak diterima untuk perbaikan, kami kembali kepada permohonan awal. Saya lanjutkan, Yang Mulia.

331. KETUA: ASWANTO

Sekarang harus jelas yang mana yang Anda mau bacakan?

332. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 60/PHP.BUP-XIX/2021: ASEP RUHIAT

Kalau (...)

333. KETUA: ASWANTO

Atau tetap membacakan yang perbaikan?

334. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 60/PHP.BUP-XIX/2021: ASEP RUHIAT

Kita tetap membacakan perbaikan apabila nanti tidak diterima yang awal, Yang Mulia.

335. KETUA: ASWANTO

Tidak ada lagi kesempatan untuk membaca ulang, kesempatan Saudara untuk membaca permohonan atau menyampaikan permohonan ini satu kali saja.

336. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 60/PHP.BUP-XIX/2021: ASEP RUHIAT

Baik, Yang Mulia. Kalau seperti itu, kami yang awal yang tidak (...)

337. KETUA: ASWANTO

Oke.

338. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Oke, silakan.

339. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 60/PHP.BUP-XIX/2021: ASEP RUHIAT

Diulangi. Hal Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 912 yang dianggap dibacakan pada tanggal 16 Desember 2020.

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi, Jalan Merdeka Barat Nomor 6 Jakarta Pusat. Yang bertanda tangan di bawah ini.

1. Nama H. Halim, segala identitasnya mohon dianggap dibacakan.
2. Nama Komperensi, S.P., M.Si., segala identitasnya mohon dianggap dibacakan adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2020 sesuai Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 26 dianggap dibacakan yang selanjutnya.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 527/SK-AR/XII/2020 Tanggal 17 Desember 2020 dalam hal ini memberikan kuasa kepada Asep Ruhiat dan kawan-kawan, kesemuanya adalah Para Advokat Pengacara pada Kantor Hukum Asep Ruhiat dan Partners yang beralamat di kantor ... berkantor di Jalan Handayani Nomor 369C Arengka Atas, Pekanbaru, Provinsi Riau, yang selanjutnya disebut Pemohon.

Terhadap Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi berkedudukan di Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi, selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi Perihal perselisihan ... penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kuantan Singingi

berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 912 yang selanjutnya dianggap dibacakan.

I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi, mohon dianggap dibacakan.

II. Kedudukan Hukum pemohon, mohon dianggap dibacakan.

III. Tenggat waktu pengajuan Pemohon, mohon dianggap dibacakan.

IV. Pokok Permohonan

1. Bahwa Berdasarkan Penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut. Tabel, mohon dianggap dibacakan. Besar ... berdasarkan tabel di atas, Pemohon berada di peringkat kedua dengan perolehan suara sebanyak 52.383 suara.
2. Bahwa karena permohonan Pemohon ini tidak hanya mempersoalkan perselisihan hasil perolehan suara saja, tetapi juga mempersoalkan adanya pelanggaran dan kecurangan terhadap asas jujur dan adil yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020. Maka, ketentuan persentase paling banyak sebesar 1,5% sebagaimana ketentuan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tersebut seharusnya tidak menjadi pembatasan bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan a quo.
3. Bahwa setelah hasil rekapitulasi perhitungan suara, Termohon menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 Andi Putra, S.H., M.H. dan H. Suhardiman Amby, M.M. sebagai pasangan calon bupati dan wakil bupati terpilih.
4. Bahwa terhadap hasil penghitungan suara tersebut, Pemohon merasa keberatan karena terdapat pelanggaran dan kecurangan yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif selama pelaksanaan pemilukada di Kabupaten Kuantan Singingi yang mempengaruhi perolehan suara Pemohon.
5. Bahwa hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon dihasilkan dari suatu proses pemilu yang bertentangan dengan asas pemilu yang luber, jurdil. Oleh karena itu, suara yang diperoleh oleh pemenang yang ditetapkan oleh Termohon bukan merupakan cerminan dari aspirasi dan kedaulatan rakyat yang jujur, tetapi karena pemberian janji-janji kepada pemilih yang luar biasa, politik identitas, ujaran kebencian, dan berkuasanya politik uang, serta keterlibatan kepada ... kepala desa dengan mengadakan perlombaan atau pertandingan dan/atau setidaknya pemilukada yang terselenggara tanggal 9 Desember 2020 di Kabupaten Kuantan Singingi merupakan pemilukada yang dipenuhi dengan begitu banyak pelanggaran dan/atau kecurangan yang dapat dikualifikasi sebagai masif, sistematis, dan terstruktur. Pemilukada yang dihasilkan dari proses tersebut di atas merupakan penyelenggaraan pemilukada yang tidak benar

dan/atau setidaknya terdapat ... dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran yang serius dan kekeliruan, serta mempunyai kaitan langsung dan mempengaruhi rekapitulasi hasil penghitungan suara khususnya perolehan suara Pemohon.

6. Bahwa pemilihan bupati dan wakil bupati adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah kabupaten untuk memilih bupati dan wakil bupati secara langsung dan demokratis melalui proses pemungutan suara, sehingga untuk mencapai suatu pemilukada yang demokratis diperlukan penyelenggaraan pemilihan yang mandiri, jujur, adil, dan kepastian hukum. Tertib penyelenggaraan pemilu, kepastian umum, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesional, akuntabel, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyatakan (...)

340. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Sudah, dianggap dibacakan (...)

341. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 60/PHP.BUP-XIX/2021: ASEP RUHIAT

Dianggap dibacakan.

342. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Langsung poin 8 saja, yang lainnya opini ini.

343. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 60/PHP.BUP-XIX/2021: ASEP RUHIAT

8. Bahwa Pemohon menemukan fakta hukum tentang proses pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Kuantan Singingi yang berlangsung tidak jujur, tidak adil, serta penuh dengan praktik kecurangan yang dilakukan oleh Termohon selaku penyelenggara secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama jajaran pemegang kekuasaan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi yang memihak kepada salah satu calon, serta terlibat secara aktif untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang memenuhi unsur-unsur yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif. Dengan pelanggaran-pelanggaran yang ditemukan di hampir semua kecamatan dengan berdasarkan fakta-fakta antara lain.

- a. Kegiatan kampanye yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak menggunakan surat tanda terima pemberitahuan (STTP) kampanye dari pihak yang berwenang yang terjadi di beberapa tempat sebagai berikut (...)

344. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Pemohon, ini kan ada beberapa kecamatan ini, ya. Kecamatan Kuantan Mudik misalnya ambil satu saja, kemudian lanjut ke kecamatan lain.

345. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 60/PHP.BUP-XIX/2021: ASEP RUHIAT

Baik.

1. Kampanye pada hari Jumat, 9 Oktober 2020 yang bertempat di Dusun 1 Rumah Godang Suku Caniago, Desa Lubuk Terentang, Kecamatan Gunung Toar dengan acara pengukuhan lembaga adat di Gunung Toar yang dihadiri Pasangan Calon Nomor Urut 1, dan selanjutnya ada beberapa ... hampir di seluruh desa kegiatan-kegiatan tersebut tidak menggunakan STTP.

Selanjutnya.

b. Penyalahgunaan wewenang berupa keterlibatan kepala desa.

1. Bahwa adanya suatu kegiatan yang bernuansa politis, yaitu adanya pertandingan bola voli dan sepak takraw yang diadakan di Desa Sikakak Kecamatan Cerenti yang dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 4 Desember 2020 dengan acara pembagian hadiah dan hiburan dengan menggunakan surat jemputan atau undangan yang melibatkan Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1 dengan menggunakan simulasi surat pencoblosan dengan gambar Pasangan Calon Nomor Urut 1.

2. Bahwa Kepala Desa Pangkalan Indarung Kecamatan Singingi diduga telah melanggar asas netralitas aparatur pemerintah dengan melakukan kampanye mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 dengan acara randai bersama masyarakat, sehingga kepala desa tersebut diperiksa dalam persidangan di Pengadilan Negeri Teluk Kuantan dengan tuntutan jaksa 4 tahun penjara dan denda Rp5.000.000,00.

3. Bahwa adanya suatu kegiatan-kegiatan yang bernuansa politis, yaitu adanya pertandingan Bola Voli Kades Cup yang diadakan di Desa Ketaping Jaya, Kecamatan Inuman yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 5 November 2020 dengan acara penutupan Bola Voli Kades Cup dan hiburan organ tunggal artis ibukota dengan menggunakan surat jemputan atau undangan yang melibatkan Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1 dengan menggunakan simulasi surat pencoblosan dengan gambar Pasangan Calon Nomor Urut 1.

c. Dugaan terjadinya money politic yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan janji-janji pemberian sesuatu oleh Calon Wakil Bupati Nomor Urut 1.

1. Bahwa hari Senin, tanggal 26 Oktober 2020 dihadiri Pasangan Calon Nomor Urut 1 mengumpulkan di sebuah rumah Syafri di Desa Pematang, Kecamatan Pangean memberikan bantuan uang sebesar Rp50.000,00 kepada masyarakat yang hadir.
2. Bahwa pada tanggal 24 September 2020 Calon Wakil Bupati Nomor Urut 1 Suhardiman Amby, M.M. telah memberikan janji dengan membagikan Kartu Jaminan Sosial ASA apabila terpilih menjadi Wakil Bupati Kabupaten Kuantan Singingi yang diduga melanggar kebebasan hak pilih warga melanggar Pasal 187 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah.
3. Bahwa ditemukan dokumen atau fakta seorang warga yang mendapatkan uang pecahan Ro100.000,00 dan Rp50.000,00 yang diduga berasal dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 sambil mengacungkan 1 jari sebagai simbol mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 di Desa Pulau Panjang Hulu Kecamatan Inuman.

d. Dugaan Black Campaign (kampanye hitam) dan ujaran kebencian di media sosial yang diduga dilakukan oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang menyerang pribadi calon bupati atau Pemohon dan SARA.

1. Bahwa pada tanggal ... bahwa pada hari Jumat, tanggal 25 September 2020 dan memposting ulang pada tanggal 5 Desember 2020 telah terjadinya ujaran atau statement yang menyudutkan Pasangan Nomor Urut 3 Pemohon, khususnya calon bupati dengan menggunakan media sosial *Facebook* yang berisi surat panduan memilih Calon Bupati Kuantan Singingi periode 2021-2026, tanggal 24 September 2020 yang mendiskreditkan Pemohon yang diduga dilakukan oleh salah satu Tim Pemenangan Nomor Urut 1.
2. Bahwa pada hari Senin, tanggal 28 September 2020 telah terjadi ujaran statement yang menyudutkan Pasangan Nomor Urut 3 Pemohon khususnya calon bupati dan menggunakan media sosial yang berisikan tuduhan Pemohon dan kaum Pemohon dengan menyebutkan sebagai orang-orang rakus yang merebut hutan masyarakat yang mendiskreditkan Pemohon atau kaum Pemohon yang diduga dilakukan oleh salah satu Tim Pemenangan Nomor Urut 1.

Bahwa pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam Pemilukada Kabupaten Kuantan Singingi yang memenuhi unsur terstruktur, sistematis, dan masif sebagaimana Pemohon uraikan di atas sangat signifikan pengaruhnya terhadap perolehan suara Pemohon memperoleh 52.383 suara dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang melakukan pelanggaran memperoleh 70.283 suara, yakni dengan selisih suara sebanyak 17.900 suara dari jumlah pemilih yang terdaftar dalam DPT sebanyak 230.488 suara. Pemilih ... sehingga ... eh, hemat Pemohon, cukup beralasan hukum untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 1 atau melakukan pemungutan suara ulang dalam Pemilukada di

Kabupaten Kuantan Singingi tersebut. Bahwa penetapan rekapitulasi hasil pemungutan suara pasangan calon dan penetapan pasangan calon terpilih yang dilakukan oleh Termohon dihasilkan dari suatu proses pemilukada yang cacat hukum dan bertentangan dengan asas pemilihan umum yang langsung, bebas, rahasia, jujur, dan adil atau luber.

Oleh karena itu, suara yang didapatkan oleh pemenang Calon Nomor Urut 1 yang ditetapkan oleh Termohon, sebagai pemenang, bukanlah merupakan cerminan dari aspirasi dan kedaulatan rakyat yang genuine. Tetapi karena pemilukada yang dipenuhi begitu banyak pelanggaran dan tindak kecurangan yang dikualifikasi sebagai pelanggaran masif, sistematis, dan terstruktur. Di mana berdasarkan uraian fakta-fakta hukum, sebagaimana Pemohon kemukakan di atas, terdapat cukup bukti dan petunjuk bahwa pelanggaran-pelanggaran tersebut bukan merupakan pelanggaran yang berdiri sendiri. Tetapi memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lainnya.

Bahwa oleh karena itu, kami memohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menyatakan tidak sah dan batal, serta tidak mengikat keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 2912 yang dianggap dibacakan.

V. Petitum

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 912/PL.02.6-Kpt/1409/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2020, tanggal 16 Desember Tahun 2020, yang diumumkan pada hari Rabu, tanggal 16 Desember 2020.
3. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan putusan atau mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya, membatalkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 912/PL.02.6-Kpt/1409/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2020, tanggal 16 Desember Tahun 2020.
4. Memerintahkan Termohon untuk melakukan penghitungan suara ulang di seluruh TPS, dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020, dan setidaknya tidaknya mendiskualifikasi Pasangan Nomor Urut 1 sebagai pemenang dan sebagai peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020.

Maaf, di nomor 3 ini ada renvoi, Yang Mulia.

346. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Yang mana renvoinya?

347. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 60/PHP.BUP-XIX/2021: ASEP RUHIAT

Memerintahkan Termohon untuk melakukan penghitungan suara, di sini diganti, "Memerintahkan Termohon untuk melakukan pemilihan (...)

348. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Pemungutan diganti pemilihan?

349. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 60/PHP.BUP-XIX/2021: ASEP RUHIAT

Pemungutan, ya. Pemungutan Suara Ulang di seluruh kecamatan sesuai dengan bukti-bukti pelanggaran yang Pemohon buktikan.

350. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Coba bisa diulangi ... yang?

351. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 60/PHP.BUP-XIX/2021: ASEP RUHIAT

Nomor 3.

352. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Ya.

353. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 60/PHP.BUP-XIX/2021: ASEP RUHIAT

Nomor 3. Memerintahkan Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang di seluruh TPS dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020, dan setidaknya mendiskualifikasi Pasangan Nomor Urut 1, sebagai pemenang dan sebagai peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020.

4. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan putusan ini.

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya atau ex aequo et bono.

Hormat kami, Kuasa Hukumnya. Terima kasih.

354. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Baik, terima kasih. Pemohon sudah menyampaikan pokok-pokok permohonan. Dan tadi juga Pemohon menyampaikan dalam persidangan ini bahwa yang dipakai itu adalah yang permohonan awal. Kan itu kepada Termohon, Bawaslu, dan Pihak Terkait, itu mengacu pada permohonan awal, ya. Mungkin ada masukan dari Yang Mulia? Silakan.

355. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya. Saudara Kuasa Hukum Pemohon, dalam perkara ini ada rekomendasi-rekomendasi tidak dari Bawaslu yang (...)

356. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 60/PHP.BUP-XIX/2021: ASEP RUHIATO

Ada beberapa rekomendasi dan ada juga yang sudah kita laporkan, baik ke Bawaslu (...)

357. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Enggak, yang ada rekomendasi itu seperti apa penyelesaiannya?

358. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 60/PHP.BUP-XIX/2021: ASEP RUHIAT

Rekomendasi bahwa kita telah melaporkan, ternyata di situ telah menjadi temuan dari Bawaslu sendiri terhadap pelanggaran-pelanggaran tersebut, jadi direkomendasikan oleh Bawaslu bahwa untuk dilanjutkan temuan Bawaslu sendiri.

359. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Sudah ditindaklanjuti?

360. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 60/PHP.BUP-XIX/2021: ASEP RUHIAT

Sudah ditindaklanjuti.

361. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oh, jadi pengaduan-pengaduan itu ternyata juga menjadi temuan.

362. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 60/PHP.BUP-XIX/2021: ASEP RUHIAT

Sudah menjadi temuan dari Bawaslu.

363. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Dan sudah ditindaklanjuti.

364. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 60/PHP.BUP-XIX/2021: ASEP RUHIAT

Dan sudah ditindaklanjuti.

365. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oh, enggak ada lagi yang rekomendasi tapi tidak terselesaikan?

366. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 60/PHP.BUP-XIX/2021: ASEP RUHIAT

Ada juga berupa putusan karena ini juga ada pernah digugat di (...)

367. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Kalo putusan, kan berarti sudah ada penyelesaian.

368. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 60/PHP.BUP-XIX/2021: ASEP RUHIAT

Ya.

369. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Apa yang belum selesai?

370. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 60/PHP.BUP-XIX/2021: ASEP RUHIAT

Ada di situ dari Nomor Urut 1 mengajukan ke TUN Medan (...)

371. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Itu sudah di (...)

372. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 60/PHP.BUP-XIX/2021: ASEP RUHIAT

Sudah diputuskan (...)

373. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Bukan, bukan, maksudnya sejak hari pemungutan suara hingga sekarang ada tidak rekomendasi yang sifatnya baru yang tidak ... yang baru maksudnya yang bukan sebelum-sebelumnya.

374. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 60/PHP.BUP-XIX/2021: ASEP RUHIAT

Belum.

375. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Sebelumnya kan memang bukan kewenangan.

376. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 60/PHP.BUP-XIX/2021: ASEP RUHIAT

Ya. Belum ada rekomendasi (...)

377. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Belum ada, ya. Oke, terima kasih, Pak Daniel.

378. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Baik. Terima kasih, Yang Mulia, Pak Suhartoyo. Penundaan sidang untuk Perkara Nomor 60 ini akan dilaksanakan pada hari Kamis 4 Februari 2021 pukul 16.15 WIB. Saya ulangi, ya, hari Kamis 4 Februari 2021, pukul 16.15 WIB dengan acara menerima dan mendengar jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, dan Bawaslu, memeriksa dan mengesahkan alat bukti. Penundaan sidang ini merupakan panggilan sidang dari Mahkamah secara resmi untuk sidang berikutnya.

Nah, dalam perkara ini ada yang mengajukan permohonan sebagai Pihak Terkait. Diajukan oleh Saudara Andi Putra dan Saudara H. Sudirman ... Suhardiman. Permohonan ini sudah disetujui dalam Rapat

Permusyawaratan Hakim untuk diterima sebagai Pihak Terkait. Apakah ada Pihak Terkait?

379. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 60/PHP.BUP-XIX/2021: DODY FERNANDO

Hadir dari Kuasanya.

380. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Baik, terima kasih, Kuasanya, ya. Nanti untuk penetapan sebagai Pihak Terkait bisa berurusan dengan kepaniteraan, ya, akan disahkan setelah persidangan ini. Baik, untuk pengesahan alat bukti, saya kembalikan pada Yang Mulia Pak Ketua, terima kasih.

381. KETUA: ASWANTO

Terima kasih, Yang Mulia. Sebelum kita sahkan alat bukti, saya mau konfirmasi sedikit saja. Ini Kuasa Hukum Perkara Nomor 85 dengan 60, satu lembaga?

382. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 60/PHP.BUP-XIX/2021: ASEP RUHIAT

Satu kantor, Yang Mulia.

383. KETUA: ASWANTO

Oh, pantes, ya. Makanya perkaranya ... apa namanya ... ini banyak meng-copy paste saja, gitu. Ada saya baca enggak ada bedanya, gitu. Nanti Saudara baca di halaman 6, halaman 6 permohonan Nomor 85 itu persis dengan apa yang Anda muat di halaman 12. Ini penyakitnya beda, obatnya sama, gini. Kan, masing-masing kabupaten lain karakteristiknya. Tapi argumentasinya Saudara ini kalau di ... apa namanya ... di karya ilmiah Anda sudah masuk plagiasi ini. Banyak sekali yang sama, gitu, ya.

Halaman 6 di apa ... di permohonan Nomor 85/PHP.BUP-XIX/2021 itu sama dengan yang ada di halaman 21 permohonan Nomor 60/PHP.BUP-XIX/2021, gitu, ya. Jangan dikira Mahkamah tidak periksa. Mahkamah periksa titik komanya, gitu, ya.

Baik, saya mau klarifikasi saja, ya, karena memang satu lembaga mungkin file-nya juga sama tinggal ganti daerah. Bukti yang Saudara masukkan, P-21 sampai dengan P-20, betul, ya?

384. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 60/PHP.BUP-XIX/2021: ASEP RUHIAT

Betul, Yang Mulia.

385. KETUA: ASWANTO

Baik, sudah diverifikasi dan lengkap.

KETUK PALU 1X

386. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 60/PHP.BUP-XIX/2021: ASEP RUHIAT

Terima kasih, Yang Mulia.

387. KETUA: ASWANTO

Baik, untuk Pemeriksaan Pendahuluan, penyampaian permohonan, Perkara Nomor 70/PHP.BUP-XIX/2021, Perkara Nomor 85/PHP.BUP-XIX/2021, dan Perkara Nomor 60/PHP.BUP-XIX/2021 selesai. Sidang (...)

388. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 60/PHP.BUP-XIX/2021: MISSINIAKI TOMMI

Izin, Yang Mulia.

389. KETUA: ASWANTO

Oh, ada, sori, silakan.

390. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 60/PHP.BUP-XIX/2021: MISSINIAKI TOMMI

Izin, Yang Mulia. Kami dari Termohon mohon diizinkan oleh Yang Mulia untuk bisa mendapatkan daftar alat bukti yang diajukan. Terima kasih, Yang Mulia.

391. KETUA: ASWANTO

Baik, nanti berhubungan dengan bagian kepaniteraan. Anda boleh memperoleh copy-an dari daftar alat bukti, tapi kalau Anda mau melihat

buktinya, bukti tidak bisa di-copy tetapi bisa diperiksa saja atau inzage saja, ya, dilihat di tempat gitu, ya.

392. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 60/PHP.BUP-XIX/2021: ASEP RUHIAT

Ya, terima kasih, Yang Mulia.

393. KETUA: ASWANTO

Nanti berhubungan dengan bagian kepaniteraan. Saya ulangi pemeriksaan untuk Perkara Nomor 70, Perkara Nomor 85, dan Perkara Nomor 60, tapi sebelumnya saya ingin menyampaikan terima kasih dulu kepada semua pihak yang menghadiri persidangan ini baik yang secara luring maupun yang secara daring, ya.

Nah, di layar tadi ada beberapa pihak yang tampil, terima kasih, KPU, kemudian Kuasa Termohon, ya, KPU-KPU kabupaten/kota, serta prinsipal-prinsipal untuk Para Pemohon ada juga yang hadir, terima kasih. Bawaslu juga ada beberapa yang hadir, ya, secara online. Terima kasih untuk kehadiran Ibu/Bapak semua.

Sidang Perkara Nomor 70/PHP.BUP-XIX/2021, Nomor 85/PHP.BUP-XIX/2021, dan Nomor 60/PHP.BUP-XIX/2021 selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 15.09 WIB

Jakarta, 29 Januari 2021

Panitera,
Muhidin

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.

